

JURNAL

# STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

I Gede Anantha Kusuma dan  
Sri Muryantini,

Faktor Pendorong Pemulihan Hubungan Antara Amerika Serikat  
Dan Arab Saudi Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump

M. Syaprin Zahidi

Diplomasi Geisha Jepang dan Dampaknya Pada Persepsi Anggota-  
anggota LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kota Malang  
Terhadap Jepang

Iva Rachmawati

Film sebagai Diplomasi Budaya?

Elisabeth M. Monica dan  
Rosalyn Theodora

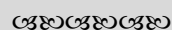
Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pmi/Pekerja Migran Internasional  
Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018

Aditya Ramadhani dan Sri  
Muryantini

Latar Belakang Keluarnya Amerika Serikat Dari Keanggotaan *Trans-  
Pacific Partnership* Di Era Presiden Donald Trump

Desy Nur Aini Al Fajri

Peran *Stakeholder* Dalam *Upgrading* Industri Pariwisata Melalui  
Desa Wisata (Studi Kasus: Pengembangan Desa Wisata  
Kembangarum Dan Desa Wisata Kasongan



# JURNAL STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

## JURNAL STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan adalah terbitan berkala dua kali dalam satu tahun. Jurnal ini merupakan media informasi karya ilmiah untuk bidang kajian diplomasi dan keamanan dalam lingkup studi Hubungan Internasional.

Jurnal ini ditujukan untuk menumbuhkan wacana akademik mengenai kajian diplomasi dan keamanan serta mendorong forum belajar mengajar lebih efektif.

Penanggung Jawab  
Muharjono

Redaktur  
Iva Rachmawati

Editor  
Desy Nur Aini Al Fajri, Suryo Wibisono,  
Sri Muryantini, Ariesani Hermawanto,, Iva Rachmawati

Design Grafis  
Suryo Wibisono

Sekretaris  
Dwi Tya Warastuti

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah hasil penelitian, kajian internasional yang bersifat ilmiah, dan kajian teoritik, terkait isu diplomasi dan keamanan studi Hubungan Internasional.

Alamat Redaksi : Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UPN "Veteran" Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk>

## DAFTAR ISI

### **Faktor Pendorong Pemulihan Hubungan Antara Amerika Serikat Dan Arab Saudi Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump**

I Gede Anantha Kusuma dan Sri Muryantini, (1-12)

### **Diplomasi Geisha Jepang dan Dampaknya Pada Persepsi Anggota-anggota LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kota Malang Terhadap Jepang**

M. Syaprin Zahidi (13-18)

### **Film sebagai Diplomasi Budaya?**

Iva Rachmawati (19-33)

### **Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018**

Elisabeth M. Monica dan Rosalyn Theodora (34-45)

### **Latar Belakang Keluarnya Amerika Serikat Dari Keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* Di Era Presiden Donald Trump**

Aditya Ramadhani dan Sri Muryantini (46-61)

### **Peran *Stakeholder* Dalam *Upgrading* Industri Pariwisata Melalui Desa Wisata (Studi Kasus: Pengembangan Desa Wisata Kembangarum Dan Desa Wisata Kasongan**

Desy Nur Aini Al Fajri (62-70)



## FAKTOR PENDORONG PEMULIHAN HUBUNGAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN ARAB SAUDI PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP

I Gede Anantha Kusuma<sup>1</sup> dan Sri Muryantini<sup>2</sup>

### Abstrak

Amerika Serikat dan Arab Saudi menghadapi hubungan yang rumit setelah Serangan 9/11. Upaya untuk memulihkan hubungan telah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden George W. Bush dan Presiden Barack Obama. Pemulihan hubungan berhasil dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi yang telah berlangsung sejak 1933 diketahui memiliki hubungan istimewa. Kerjasama antara kedua negara juga mencakup berbagai bidang seperti, bidang ekonomi melalui kerja sama minyak, bidang keamanan-politik melalui kerja sama kontra-komunisme dan keamanan regional, serta bidang sosial-budaya yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan kerja sama pengembangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong di balik pemulihan hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi selama pemerintahan Presiden Donald Trump.

**Kata kunci:** Restorasi, Hubungan, Amerika Serikat, Arab Saudi

### Abstract

*The United States and Saudi Arabia had face a complicated relation after 9/11 Attack. Efforts to restore relations have been done since the reign of President George W. Bush and President Barack Obama, and relationship restoration successfully made during the reign of President Donald Trump. The relationship between the United States and Saudi Arabia has been going on since 1933, both countries are also known to have privileged relationships. Cooperation between the two countries also covers various fields such as, the economic field in oil cooperation, the political-security field in counter-communism and regional security cooperation, and the socio-cultural field in health, education and community development cooperation. This research aims to determine the driving factors behind the relationship restoration between the United States and Saudi Arabia during the administration of President Donald Trump.*

**Keywords:** Restoration, Relationship, United States of America, Saudi Arabia.

### PENDAHULUAN

Kerjasama bilateral terjadi ketika dua buah negara memiliki kesepahaman yang sama terhadap satu hal sehingga menginginkan adanya kerjasama agar bisa menguntungkan kedua belah pihak, hanya saja proses kerjasama bilateral tidak selamanya bisa berjalan mulus, banyak hal juga yang bisa menyebabkan sulit terjadinya kerjasama bilateral

negara tersebut. Dalam kasus ini, Amerika Serikat (kemudian disebut AS) dengan Arab Saudi (kemudian disebut Saudi) memiliki perbedaan yang cukup mencolok. AS merupakan negara sekuler dan berbentuk republik demokratik sedangkan Saudi merupakan negara ultrakonsevatif Islam berbentuk monarki. Melihat kedua perbedaan tersebut seharusnya jika dilihat dari kacamata orang awam, maka hubungan antara AS dan Saudi sepertinya sulit

<sup>1</sup> Penulis adalah peneliti pada Laboratorium Diplomasi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN 'Veteran' Yogyakarta. E mail: gd.ananthe@gmail.com.

<sup>2</sup> Penulis adalah pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN 'Veteran' Yogyakarta. E mail: srimuryantini03@gmail.com

untuk diwujudkan, namun kenyataannya hubungan kedua negara ini berjalan cukup mulus bahkan di beberapa tahun terakhir kedua negara kadang-kadang digambarkan memiliki "Hubungan Istimewa" satu sama lain.

Kerjasama AS dan Saudi sudah berlangsung cukup lama terbukti keduanya memiliki kerjasama yang cukup baik di berbagai bidang, hanya saja memang penggantian kepemimpinan di AS sendiri juga menyebabkan berbedanya langkah yang diambil oleh tiap-tiap Presiden, begitu juga yang terjadi juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush dan Presiden Barack Obama yang dimana bisa dilihat adanya penurunan atau kebekuan kerjasama antara kedua negara yang bermula saat pemboman gedung WTC pada 11 September 2001. Namun pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump sepertinya terjadi upaya pengaturan ulang hubungan antara kedua negara, yang dimana bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar keduanya, terbukti dengan hadirnya Presiden Donald Trump pada KTT Arab-Islam Amerika pada bulan Mei 2017 lalu, dimana pada saat itu terjadi kesepakatan kerjasama keamanan sebesar USD 100 Miliar bagi Saudi.

Berdasarkan fakta tersebut dapat dilihat bahwa memang ada upaya dari AS sendiri untuk membangun ulang hubungannya dengan Saudi dan hal ini merupakan capaian yang bagus yang dilakukan oleh Presiden Trump karena pemulihan hubungan ini bisa menjadi landasan awal bagi AS untuk kembali mengukuhkan hegemoninya di Timur Tengah. Tulisan ini hendak menganalisis tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemulihan hubungan antara AS dan Saudi pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

## **PEMBAHASAN**

### **Kepentingan Nasional**

Pembahasan mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya pemulihan antara AS dan Saudi pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump akan didekati melalui konsep kepentingan nasional. Dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, suatu negara berusaha untuk melindungi dan mempertahankan diri dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan

pemenuhan kebutuhan negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara, unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup antar bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (Oppenheim, 1987: 369-389).

Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa kepentingan nasional senantiasa ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif

Sebuah negara jelas akan melakukan segala hal demi mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional sendiri merupakan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintahan sebuah negara dalam tingkat global atau Internasional seperti integritas teritorial dan penjagaan kemerdekaan politik. Kemudian, kepentingan nasional mengekspresikan kekuatan objektif, mengandung pembenaran, membutuhkan minimal mewakili negara, politik, dan identitas kultural, sebuah elemen pembeda yang datang dari tekanan masyarakat dan juga keinginan dari masyarakat (Hyndman, 1970/1971: 5-8).

Selain itu, definisi pengertian kepentingan nasional dapat dibagi dalam dua aspek yaitu yang pertama adalah kepentingan nasional untuk kebaikan bersama dengan membuang jauh rasa keegoisan, individualis. Lalu yang kedua adalah kepentingan nasional yang dianggap sebagai prinsip diplomasi yang dimiliki negara untuk memperjuangkan kepentingan bersama (Clinton, 1986: 495-519). Lalu menurut Rochester terdapat dua asumsi yang muncul dan mendarah daging di dalam konsep kepentingan nasional yaitu, "adanya kepentingan kolektif yang dapat ditentukan secara obyektif dalam sebuah kesetaraan masyarakat, dan kepentingan kolektif ini melebihi kepentingan lainnya, bahwa setiap individu saling berbagi dalam masyarakat nasional yang lain (Rochester, 1978: 77-96). Melalui definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepentingan Nasional sendiri merupakan salah satu aspek terpenting dalam berdirinya suatu negara, karena kepentingan nasional sendiri bisa

dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam berdirinya suatu negara.

Dalam proses pencapaian Kepentingan Nasional, pengaplikasian *Foreign Policy* (kebijakan luar negeri) pun diperlukan karena dalam proses pencapaian tujuan dari kepentingan nasional tidaklah terlepas dari kekuatan atau *power* seperti mengontrol negara lain agar kepentingan nasional suatu negara dapat terwujud. Hans Morgenthau menyatakan bahwa "semakin besar stabilitas masyarakat dan rasa aman anggotanya, maka akan kecil kemungkinan untuk emosi kolektif dalam mencari jalan nasionalisme agresif, begitu pula sebaliknya (Glanville, 2005: 33-37). Dalam kata lain, kita bisa mengartikan kepentingan nasional tidak hanya terefleksikan dalam klaim yang spesifik namun juga kepentingan nasional bisa sama koekstensif seperti *Policies / Kebijakan* (Ninic, 1999: 29-55). Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, aturan-aturan atau kebijakan pun diperlukan untuk membangun korespondensi diantara kepentingan nasional yang dinyatakan sebagai kebutuhan dan jenis kebijakan oleh yang maju.

Dengan begitu negara bisa menjalankan kepentingan nasionalnya yang selanjutnya akan ditinjau dengan sudut pandang dari kepentingan nasional yang mana juga tidak lupa untuk selalu melandasi kepentingan nasional dengan rasionalitas dan moralitas. Karena jika kita melaksanakan atau melakukan proses pencapaian kepentingan nasional tidak dilandasi oleh moralitas dan hanya bergantung pada rasionalitas, kepentingan itu bisa jadi tidak bermoral. Meskipun begitu, bukan berarti kita harus berlandaskan hanya dengan moralitas. Perlu digaris bawahi, segala sesuatunya harus pada posisi yang seimbang, karena kegagalan untuk bertindak rasional dapat terdiri tidak hanya memilih cara yang tidak memadai, tetapi juga misalnya ketika salah menilai preferensi seseorang yang sebenarnya.

Definisi Kepentingan Nasional menurut Hans J. Morgenthau menjadi salah satu acuan dari penelitian ini, pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump meskipun banyak kebijakan yang cukup kontroversial selama setahun masa jabatannya, misalnya larangan masuk ke AS bagi 6 negara di Timur Tengah, keluar dari Organisasi Kerjasama Perdagangan Antar Negara Pasifik (*Trans Pacific Partnership / TPP*), serta pernyataan sepihak

mengenai *status quo* kota Yerusalem yang kini dianggap milik Israel. Jelas terlihat konsep kepentingan nasional benar-benar diterapkan secara nyata oleh Presiden Donald Trump, dan memang suatu kebijakan yang diambil tidak mungkin akan sepenuhnya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Definisi ketidak masuk akal maupun moralitas dalam menentukan suatu kebijakan merupakan sesuatu yang relatif, tidak masuk akal bagi sebagian besar orang bukan berarti tidak masuk akal juga bagi perancang kebijakan, begitu juga kebijakan untuk memulihkan hubungan dengan Saudi meski dinilai cukup tidak masuk akal bagi sebagian besar orang karena Presiden Donald Trump dianggap rasis bagi sebagian negara Arab, nyatanya hubungan kedua negara memang dicoba untuk direkatkan kembali pada masa pemerintahan Donald Trump, hadirnya Presiden Donald Trump dalam KTT Arab Islam Amerika pada Mei 2017 yang lalu merupakan salah satu bukti bahwa harapan pemulihan hubungan memang jelas masih terbuka lebar.

Selain itu, berbicara tentang kepentingan nasional maka konteks hegemoni tidak akan terlepas dari kebijakan luar negeri AS itu sendiri, AS dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan konsep Hegemoni Koersif. Wittkopf (2008) menyatakan bahwa,

"Hegemoni koersif mengikuti konsepsi politik realis tentang politik internasional, yang menerapkan pengaruh stabilisasi kekuatan dominan dan peran *hard power* dalam politik internasional. Ini juga sesuai dengan pandangan hegemoni yang lebih radikal (dikenal dengan nama Gramscian setelah pemikir radikal dan pemimpin Partai Komunis Italia Antonio Gramsci), yang menganggap hegemoni sebagai sumber nilai sosial dan budaya yang dominan dalam sistem internasional."

Oleh karena itu mengukuhkan hegemoni di Timur Tengah menjadi salah satu kepentingan nasionalnya karena sebagai ikut berpartisipasi dalam gejolak politik di Timur Tengah dan bekerjasama dengan Saudi yang merupakan aktor utama dalam regional tersebut juga berarti bisa membuat hegemoni AS

menjadi semakin kuat. Selain itu dapat dilihat juga ancaman yang bisa saja timbul dari Rusia yang sudah mulai meancapkan hegemoninya di Timur Tengah melalui perannya dalam perang saudara di Suriah. Oleh karenanya berkerja sama dalam bidang pertahanan dengan Saudi merupakan salah satu pilihan yang logis yang bisa diambil oleh AS untuk mempertahankan integritas serta hegemoninya di Timur Tengah

## **Dinamika Kerjasama Amerika Serikat – Arab Saudi**

Kerjasama antara AS dan Saudi sudah berlangsung cukup lama dan juga meliputi berbagai bidang seperti kerjasama di bidang Ekonomi, bidang Politik-Keamanan dan bidang Sosial-Budaya.

### **1. Kerjasama di Bidang Ekonomi**

Awal mula terjadinya kerjasama antara AS dan Saudi adalah pada bidang ini, sejak diberikannya hak kepada CASOC untuk mengeksplorasi minyak di provinsi al-Hasa, akhirnya kerjasama ekonomi terjalin. Lalu, setelah upaya eksplorasi minyak CASOC berhasil, kerjasama akhirnya ditingkatkan dan CASOC merubah namanya menjadi Aramco dimana saham kedua negara dibagi menjadi 50-50. Dampak dari perubahan tersebut adalah meningkatnya kerjasama di bidang minyak antara AS dan Saudi.

Selain minyak, kerjasama di bidang ekonomi antara AS dan Saudi juga diperluas melalui pembentukan *The Saudi American Business Council* (Dewan Bisnis Saudi-AS) pada tahun 1993 sebagai institusi hukum di Amerika Serikat. Abdullah Juma'h, mantan presiden Aramco, terpilih sebagai ketua tim Saudi. Dewan tersebut bertujuan untuk mengaktifkan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi bilateral antara perusahaan sektor swasta di kedua negara, selain memberikan kontribusinya untuk menyelenggarakan *Business Opportunity Forum* (Forum Peluang Bisnis) antara kedua negara.

Pada September 2015, kedua negara mengumumkan untuk membuat suatu perjanjian baru lagi yakni *Strategic Partnership Agreement for the 21<sup>st</sup> Century* (Perjanjian Kerjasama Strategis untuk Abad 21) dan pembentukan *Permanent Strategic Cooperation Office* (Kantor Kerjasama Strategis Permanen) untuk meningkatkan hubungan kedua negara.

Melalui beberapa perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa kerjasama AS dan Saudi di bidang ekonomi memang mengalami pasang surut namun keduanya berupaya untuk selalu meningkatkan kerjasama ekonomi dari waktu ke waktu.

### **2. Kerjasama di Bidang Politik-Keamanan**

Kerjasama di bidang politik-keamanan merupakan salah satu kerjasama yang cukup berhasil dijalin oleh AS dan Saudi. Kerjasama keamanan antara AS dan Saudi bermula pada masa Perang Dunia II, dimana pada saat itu Saudi mendapat serangan dari Italia sehingga membutuhkan bantuan dari luar. AS yang pada saat itu sangat membutuhkan pasokan minyak Saudi akhirnya bersedia membantu dan mengirimkan pasukannya ke Saudi.

Kemudian pada saat Perang Dingin kerjasama ini meningkat, dimana keduanya memiliki pemahaman yang sama terhadap komunisme. Sehingga keduanya melakukan kerjasama agar komunisme tidak ikut menyebar khususnya di wilayah Timur Tengah dan beberapa negara Asia. Dapat dikatakan pada tahun 1973-1992 merupakan titik tertinggi kerjasama antara AS dan Saudi dimana setelah Saudi berhasil masuk radar Washington pada tahun 1973, penjualan senjata AS di Saudi melonjak, begitu pula konstruksi fasilitas militer Saudi di AS. Selain itu, Saudi menjadi penyedia minyak asing nomor satu selama dalam tahun-tahun tersebut.

Kerjasama terbaru, Pemerintah AS telah membuat rencana untuk menjual helikopter *multi-mission* 10 MH-60R untuk Saudi, rudal 600 Patriot Advanced Capability-3, dan lebih dari USD 500 juta untuk munisi dan amunisi *air-dropped*. Sebagai hasil bantuan keamanan AS, Saudi telah menggagalkan sejumlah upaya teroris terhadap Saudi dan berkontribusi pada operasi koalisi melawan ISIS di Suriah. AS juga tetap berkomitmen untuk menyediakan angkatan bersenjata Saudi dengan peralatan, pelatihan, dan dukungan lanjutan yang diperlukan untuk melindungi Saudi dari efek destabilisasi terorisme dan ancaman lainnya.

### **3. Kerjasama di Bidang Sosial-Budaya**

Selain kerjasama di bidang ekonomi dan politik-keamanan, kerjasama antara AS dan Saudi juga dilakukan pada bidang sosial-budaya. Dalam kerjasama ini dibagi lagi dalam beberapa sub-

bidang seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Kemasyarakatan.

Pada bidang kesehatan sendiri, Saudi pernah meminta bantuan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (*Center for Disease and Control / CDC*) dalam mengaudit persiapannya untuk melindungi kesehatan jamaah haji pada tahun 2009.

Pada bidang pendidikan AS memberikan layanan konsultasi pendidikan melalui *Education USA* untuk membantu siswa Saudi dalam mengeksplorasi pilihan untuk belajar di AS dan mendukung peningkatan pembelajaran bahasa Inggris. AS dan Saudi juga mengadakan *Saudi Young Leaders Exchange Program* (SYLEP).

Kemudian di bidang pengembangan kemasyarakatan, dalam beberapa tahun terakhir lebih dari 125 orang Saudi melakukan perjalanan ke AS di berbagai program pertukaran yang disponsori oleh AS termasuk siswa pertukaran sekolah menengah atas, peserta Fulbright, dan lebih dari 80 pemimpin baru yang terpilih untuk *International Visitors Leadership Program* (IVLP).

Kerjasama tersebut masih berlangsung hingga sekarang dan upaya pengembangan kerjasama khususnya di bidang Sosial-Budaya juga terus dilakukan oleh AS dan Saudi.

### **Hambatan Pemulihan Hubungan**

Meskipun, memulihkan hubungan dengan Saudi menjadi salah satu perhatian dari pemerintah AS, tidak berarti bahwa pemulihan hubungan berjalan mulus begitu saja, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pemulihan hubungan antara AS dan Saudi, seperti:

1. Ketidakamanan Regional Setelah Invasi Amerika Serikat ke Irak.

Pada 19 Maret 2003, AS memulai serangan militer di Irak meskipun tidak secara resmi dinyatakan sampai hari berikutnya, dapat dikatakan ini adalah awal dari Perang Irak yang dipimpin AS. Hal ini membawa dampak yang cukup buruk dalam upaya pemulihan hubungan AS dengan Saudi. Perang Irak 2003 memiliki tiga konsekuensi, yakni, Pertama, hal ini menciptakan begitu banyak ketidakstabilan sehingga Al-Qaida, dan kemudian ISIS dapat berkembang di wilayah itu. Kedua, perang mengakhiri setiap prospek Irak yang berfungsi

sebagai penyeimbang Iran. Ketiga, biaya luar biasa dari Perang Irak yang gagal, baik dalam darah dan harta karun, menyebabkan sentimen anti-perang di AS.

2. Dukungan Pemerintahan Presiden Obama untuk Presiden Mursi dan Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) di Mesir.

Pada tanggal 24 Juni 2012, Komisi Pemilihan Umum Mesir mengumumkan bahwa Presiden Muhammad Mursi memenangkan Pemilu Presiden dengan mengalahkan Ahmed Shafik, Perdana Menteri terakhir di bawah kekuasaan Hosni Mubarak. Pemilihan Umum ini merupakan awal demokratisasi di Mesir dan sangat di dukung oleh AS. Pejabat dan diplomat AS menyatakan mendukung proses demokrasi, terlepas dari hasil pemilihan. Hal ini tidak disukai oleh Saudi dikarenakan upaya demokratisasi yang terjadi di Mesir juga membawa ketakutan sendiri bagi keamanan internal Saudi yang mungkin juga berdampak pada upaya serupa yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat Saudi, upaya otoriter Presiden Mursi pun juga kurang diterima oleh Saudi. Oleh karena itu Saudi juga ikut ambil bagian dalam kudeta Presiden Mursi pada 2013 (yang kemudian berhasil dikudeta) yang berdampak pada semakin merenggangnya hubungan dengan AS, dimana kala itu AS tidak mendukung upaya kudeta terhadap Presiden Mursi.

3. Kebijakan Non-Intervensi Pemerintahan Presiden Obama tentang Suriah.

Perang Saudara di Suriah merupakan konflik bersenjata berbagai pihak dengan intervensi internasional yang berlangsung di Suriah. Dalam perang ini, AS yang dianggap sebagai polisi dunia nyata tidak melakukan intervensi terhadap perang tersebut. Hal ini dilakukan untuk selain untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan lanjutan di Timur Tengah dan ini adalah upaya AS untuk mengubah citra politik luar negeri yang lebih baik. Upaya non-intervensi ini sayangnya tidak bisa diterima oleh Saudi, dikarenakan dengan non-intervensi AS di Suriah menyebabkan perang ini semakin berlanjut lebih luas dan ketakutan Saudi adalah jika demonstrasi tersebut juga berpengaruh di wilayahnya, itu sebabnya upaya non-Intervensi AS dalam perang Suriah ini dikhawatirkan oleh Saudi mengenai dampak lanjutan yang akan terjadi. Hal ini

juga yang kemudian kembali memberikan tantangan bagi AS untuk memulihkan hubungannya dengan Saudi.

#### 4. Terjadinya Perjanjian Antara P5+1 dengan Iran atas Program Nuklirnya.

Pada Februari 2017, Iran dan P5+1 telah mencapai kesepakatan nuklir pada pembicaraan di Wina. Perjanjian tersebut dapat membawa pembebasan sanksi kepada Iran yang beriklan tahun 2006. Sanksi ekonomi telah melumpuhkan ekonomi Iran dan secara signifikan memangkas ekspor minyaknya. Kesepakatan itu dapat dicirikan sebagai *win-win solution* untuk AS, Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, Cina dan pemerintah Iran.

Seperti yang diketahui, hubungan Saudi dan Iran kian memanas setelah terjadi Revolusi Iran pada 1979, dimana melalui revolusi tersebut banyak perbedaan pandangan yang dihadapi Saudi dan Iran, terjadi juga perang proxy antara kedua negara dalam berupaya menjadi kekuatan utama di Timur Tengah. Kemudian hal ini membuat Saudi khawatir karena kekuatan Iran juga akan meningkat seiring dengan dilakukannya pembebasan sanksi terhadap Iran. Oleh karena itu hal ini menjadi momok tersendiri bagi Saudi, selain itu keterlibatan AS dalam upaya pembebasan sanksi ini juga menambah rumitnya upaya pemulihan hubungan antara AS dan Saudi.

Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemulihan hubungan memang sulit dilakukan, meskipun memiliki banyak hambatan nyatanya pemulihan hubungan berhasil dilakukan. Namun, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa yang sebenarnya mendorong AS melakukan pemulihan hubungan dengan Saudi. Karena nyatanya banyak sekali hambatan yang dilalui namun AS masih saja ingin melakukan pemulihan hubungan dengan kerajaan tersebut.

#### **Penguatan Strategi "Twin Pillar" Amerika Serikat untuk Mengukuhkan Kembali Hegemoninya di Timur Tengah**

Berbicara tentang kepentingan nasional maka konteks hegemoni tidak akan terlepas dari kebijakan luar negeri AS itu sendiri, AS dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan konsep *Coercive Hegemony* atau Hegemoni Koersif.

Melihat pada kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, terlihat ada upaya untuk menancapkan hegemoni dalam rangka memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Dalam mewujudkan hal tersebut, AS kemudian membuat suatu kebijakan mengenai strategi yang dilakukan untuk dapat menancapkan hegemoninya di Timur Tengah, strategi tersebut dikenal dengan strategi *Twin Pillar*.

Strategi *Twin Pillar* atau Strategi Pilar Kembar merupakan salah satu strategi yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Nixon dimana pada masa pemerintahannya muncul juga suatu doktrin yang dikenal sebagai *The Nixon Doctrine*, yang kemudian melalui doktrin ini munculah strategi tersebut.

Doktrin Nixon muncul pertama kali saat kunjungannya di Guam. Presiden Nixon menyatakan AS akan menghormati semua komitmen perjanjiannya di Asia, tetapi Presiden Nixon menyatakan bahwa,

"Sejauh hal tersebut menyangkut masalah keamanan internal maupun masalah pertahanan militer, kecuali ancaman kekuatan besar yang melibatkan senjata nuklir, Amerika Serikat akan mendorong dan berhak untuk berharap bahwa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut akan ditangani dan dipertanggungjawabkan oleh negara-negara Asia itu sendiri".

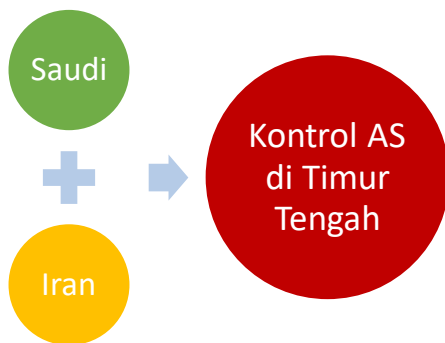
Menurut Michael Klare, penerapan Doktrin Nixon seperti "membuka pintu air" terhadap bantuan militer AS kepada sekutunya di Timur Tengah. AS kemudian beralih ke Saudi dan Iran sebagai "pilar kembar" stabilitas regional. Kenaikan harga minyak pada tahun 1970 dan 1971 juga meningkatkan pendanaan ekspansi militer terhadap kedua negara. Total transfer senjata dari AS ke Iran meningkat dari USD 103,6 juta pada tahun 1970 menjadi USD 552,7 juta pada tahun 1972, lalu ke Saudi meningkat dari USD 15,8 juta pada tahun 1970 menjadi USD 312,4 juta pada tahun 1972.

Kebijakan Pilar Kembar ini menasar dua target strategis, yakni mencegah ancaman atas kepentingan-kepentingan Barat dan menyiapkan fondasi untuk melancarkan intervensi tidak langsung



di Teluk Persia berdasarkan strategi Nixon. Strategi Nixon terkait Teluk Persia tampak jelas dalam kebijakan Pilar Kembar ini. Berdasarkan kebijakan itu, Saudi dan Iran dijadikan dua pilar utama penjaga kepentingan AS di kawasan. Dengan iming-iming bantuan ekonomi dan militer, AS berusaha menjadikan kedua Iran dan Saudi sebagai alat untuk memperkuat posisinya di Teluk Persia tanpa harus hadir langsung di kawasan itu. Nixon mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan reformasi di negara-negara pesisir Teluk Persia merupakan salah satu masalah penting dalam kerangka menjaga keamanan dan ketenangan kawasan. Saudi dan Iran dapat bekerjasama untuk memperkuat ketenangan di kawasan.

**Bagan 1**  
**Strategi *Twin Pillar* (Pilar Kembar)**



Sumber: Foreign Affairs, "Twin Pillars to Desert Storm: America's Flawed Vision in the Middle East From Nixon to Bush", <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1993-09-01/twin-pillars-desert-storm-americas-flawed-vision-middle-east-nixon>, diakses pada 19 Maret 2018.

Pada masa Perang Dingin, AS sendiri khawatir atas keamanan sehingga pertahanan militer Teluk Persia terus berlanjut diintensifkan. Minat AS di Teluk Persia sebenarnya sangat sederhana, yakni:

1. Untuk memastikan akses oleh dunia industri ke kawasan yang luas sumber daya itu, dan
2. Untuk menghadang kontrol politik dan militer Soviet serta kontrolnya pada sumber daya di Teluk.

Kepentingan dari wilayah tersebut terlihat meningkat seiring dengan peningkatan ketergantungan Barat pada minyak Teluk Persia dan Timur Tengah serta kebutuhan untuk menjamin akses sumber daya berkelanjutan di wilayah

tersebut. Strategi Pilar Kembar sebenarnya dapat dikatakan berhasil, terbukti bahwa pengaruh AS di Timur Tengah ketika strategi ini dijalankan juga ikut meningkat. Kepentingan AS di Teluk juga tetap terakomodir, yakni bahwa menjadi terbukanya akses industri untuk mengelola sumber daya alam dan berhasilnya upaya penghadangan penyebaran lebih luas terhadap paham komunisme oleh Soviet di Timur Tengah. Namun, meskipun strategi ini dinilai efektif pada masa itu untuk memperkuat kekuasaan AS di Timur Tengah, nyatanya strategi ini pernah mengalami stagnansi, stagnansi yang pertama yakni saat Revolusi Iran pada 1979 dan kemudian stagnansi kedua terjadi lagi saat serangan 9/11.

Setelah Revolusi Iran, AS kemudian hanya bertumpu pada Saudi untuk tetap bisa mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah, sayangnya hubungan AS dengan Saudi juga ikut memburuk pasca serangan 9/11, Saudi dituduh sebagai aktor di balik serangan, selain itu juga muncul gerakan anti-Amerikanisme di Saudi yang kembali memperparah hubungan antara keduanya.

Sehingga dapat dikatakan strategi yang diusung oleh Presiden Nixon ini akhirnya benar-benar runtuh pasca serangan 9/11, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa strategi ini juga bisa dikatakan berhasil, hanya saja memang setelah beberapa hal terjadi, AS terpaksa harus vakum dalam menjaga stabilitasnya hegemoninya di Timur Tengah kala itu.

Beberapa tahun setelah serangan 9/11, tepatnya pada tahun 2003, AS terlihat melakukan pendekatan kembali dengan Iran, melalui upayanya dalam mendukung Iran dalam Invasi Irak. Hanya saja upaya ini sepertinya tidak sepenuhnya berhasil untuk membangun kembali kedua pilar yang sempat runtuh, dari pandangan Saudi, dukungan AS pada Iran dapat dikatakan sebagai mimpi buruk, karena hubungan Saudi dan Iran setelah Revolusi 1979 juga mengalami ketidakstabilan. Hal ini juga yang kembali memperparah hubungan antara AS dan Saudi kala itu, sehingga upaya hegemoni AS di Timur Tengah kembali nihil terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *U.S. Military Strength*, sebenarnya upaya pengukuhan hegemoni AS di Timur Tengah dapat dikatakan cukup berhasil hanya saja dalam indeks stabilitas politik memang masih sangat kurang

**Tabel 1**  
**Indeks Kesuksesan Kebijakan Luar Negeri AS**  
**di Timur Tengah**

**Operating Environment: Middle East**

	VERY POOR	UNFAVORABLE	MODERATE	FAVORABLE	EXCELLENT
Alliances			✓		
Political Stability	✓				
U.S. Military Posture			✓		
Infrastructure			✓		
<b>OVERALL</b>			✓		

Sumber: U.S. Military Strengh, "Middle East", <https://index.heritage.org/military/2017/assessments/operating-environment/middle-east/>, diakses pada 20 Maret 2018.

Lemahnya stabilitas politik AS di Timur Tengah disebabkan karena AS sampai saat ini pun belum sepenuhnya berhasil membangun kembali kedua pilar yang runtuh secara bersamaan, belum lagi dengan perang proxy yang dihadapi oleh Saudi dan Iran saat ini dimana keduanya bersaing menjadi kekuatan utama di Timur Tengah, persaingan ini juga yang membuat semakin kompleksnya upaya AS dalam mengukuhkan kembali hegemoninya di Timur Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa, pertama, Saudi merupakan salah satu negara terkuat di wilayah Timur Tengah (bersama dengan Iran), andil besarnya dalam mewakili suara Timur Tengah dalam beberapa forum internasional serta pengaruhnya dalam komunitas Islam di seluruh dunia, kekuatan di bidang energinya dan upaya pembukaan dirinya terhadap perluasan ekonomi dan politik-keamanan, oleh sebab itu Saudi tidak boleh dianggap sebelah mata oleh AS.

Kedua, persaingan antara Saudi dan Iran harus segera dinetralisir oleh AS, karena jika upaya pemulihan hubungan hanya dilakukan terhadap Iran tanpa memikirkan Saudi maka penguatan kembali hegemoni AS di Timur Tengah nyatanya akan sulit dilakukan. Upaya pemulihan hubungan memang tidak mudah untuk dilakukan, namun melihat upaya AS saat ini untuk menjalin kembali hubungan baik yang sempat merenggang dengan Saudi merupakan titik awal yang bagus untuk memulihkan hubungan keduanya. Selain itu, menyeimbangkan kekuatan antara Saudi dan Iran harus segera dipikirkan oleh AS karena jika terjadi ketidakstabilan dalam poros

kekuatan Timur Tengah, maka upaya AS untuk mengukuhkan kembali hegemoninya di Timur Tengah akan semakin sulit terjadi.

**Peluang Kerjasama Ekonomi yang Lebih Luas Bagi Amerika Serikat**

AS dan Saudi telah melakukan kerjasama ekonomi sejak 1933 dimana komoditas utama kerjasama ekonomi yang di bidang minyak dan melalui *Standard Oil Company* (kini Saudi Aramco) yang kala itu berinvestasi di Saudi untuk mengeksplorasi peluang minyak di Saudi. Melalui kerjasama tersebut AS-Saudi kemudian menjalin kerjasama yang cukup kuat dikarenakan minyak menjadi salah satu komoditas utama yang dibutuhkan AS, sedangkan di sisi lain Saudi membutuhkan AS sebagai sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan Saudi. Kerjasama itu pun masih berlangsung hingga saat ini, namun kerjasama ekonomi antara AS dan Saudi kini diperluas tidak hanya bertumpu pada minyak saja namun juga membuka pada peluang kerjasama ekonomi di bidang yang lain.

Mengacu pada hal tersebut, Saudi kini telah membuat strategi ambisius untuk merestrukturisasi ekonomi yang selama ini hanya bergantung pada minyak, strategi tersebut bernama *Vision 2030*, hal ini melibatkan diversifikasi, privatisasi aset negara besar termasuk raksasa energi Aramco, kenaikan pajak dan belanja serta pemotongan subsidi. Upaya restrukturisasi ekonomi cukup menarik perhatian dunia, rencananya akan mengurangi ketergantungan historis yang tinggi pada minyak dengan mengubah cara Saudi dalam mendapatkan pendapat serta mengelola sumber daya alam Saudi yang sangat besar. Hal ini didukung oleh rencana aksi terperinci, implementasi awal yang telah melibatkan perubahan kelembagaan *headline-grabbing* di negara yang sudah lama dikenal dengan kehati-hatian dan gradualismenya ini. Alasan percepatan untuk merestrukturisasi ekonomi adalah Saudi berkaca dampak jatuhnya tajamnya harga minyak internasional pada tahun 2014, dimana ekonomi Saudi langsung merosot dan mengalami kesusahan untuk bangkit karena tidak bergantung di sektor yang lain. Penjualan minyak selama ini menghasilkan sebagian besar pendapatan Saudi dan sektor publik menjadi kekuatan ekonomi yang dominan, oleh

karenanya para pejabat Saudi sudah sejak lama khawatir bahwa kurangnya keragaman ekonomi Saudi dapat membahayakan keamanan finansial jangka panjangnya.

Itu sebabnya *Vision 2030* sangat penting, Saudi kini berusaha mendapatkan kembali kendali yang lebih baik atas ekonomi dan keuangannya, oleh karenanya Saudi merancang rencana restrukturisasi ekonomi ambisius yang dipelopori oleh wakil putra mahkota baru yang energik, Mohammed bin Salman Al Saud.

**Gambar 1**  
Tema *Vision 2030* Saudi



Sumber: Saudi Vision 2030, "Governance Model for Achieving Saudi Arabia's Vision 2030, <http://vision2030.gov.sa/en>, diakses pada 22 Maret 2018.

Dalam konteks yang lebih sederhana, *Vision 2030* berfokus pada tiga bidang utama, yakni, pertama, rencana ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan non-minyak, dengan menaikkan biaya dan tarif pada layanan publik, secara bertahap memperluas basis pajak (termasuk melalui pengenalan pajak pertambahan nilai), dan meningkatkan lebih banyak pendapatan dari semakin banyak pengunjung ke Saudi.

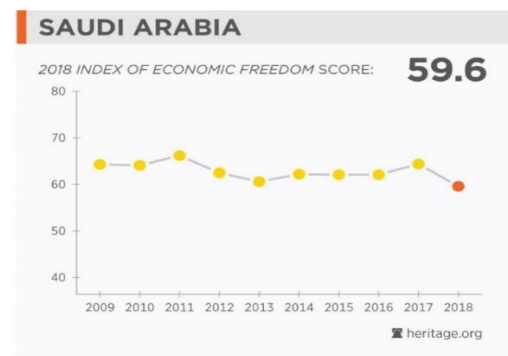
Kedua, pihak berwenang ingin mengurangi pengeluaran dengan menurunkan subsidi, merasionalisasi program investasi publik besar-besaran di negara itu, dan mengalihkan pembelanjaan dari negara asing.

Ketiga, Saudi berusaha untuk mendiversifikasi kekayaan nasionalnya dan dalam prosesnya, meningkatkan pendapatan investasi saat ini. Sebagai contoh, rencana tersebut akan mengumpulkan dana melalui *Initial Public Offering / IPO* dari sebagian kecil (hingga 5%) Saudi-Aramco, konglomerat minyak raksasa, dan menginvestasikan

hasil dalam berbagai aset yang lebih luas di seluruh dunia.

Visi ekonomi yang berani ini bukannya tanpa risiko. Transisi ekonomi pada dasarnya rumit, terutama salah satu dari skala dan ruang lingkup ini. Kesuksesan awal sering dibutuhkan untuk memperkuat pembelian besar dari konstituen kunci, terutama yang secara alamiah mungkin akan resisten terhadap perubahan pada awalnya.

**Gambar 2**  
Indeks Kebebasan Ekonomi Saudi 2009-2018



Sumber: Heritage, "Saudi Arabia", <https://www.heritage.org/index/country/saudi-arabia>, diakses pada 23 Maret 2018.

Selain itu, indeks kebebasan berekonomi juga meningkat dalam rentang tahun 2012-2017, meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan karena perhitungan indeksnya baru berada pada kuartal pertama pada tahun 2018, namun ini menunjukkan peluang investasi di Saudi juga meningkat dan hal ini sangat bagus dalam peningkatan investasi AS di Saudi. Sehingga perusahaan AS yang ingin berinvestasi di Saudi tidak perlu merasa cemas terhadap upaya monopoli pasar maupun terkendala dalam administrasi yang sulit ketika ingin berinvestasi ataupun melakukan kerjasama di Saudi.

Melihat upaya restrukturisasi ekonomi Saudi tersebut semakin menunjukkan upaya Saudi dalam menstabilkan kekuatan ekonominya, hal ini juga menjadi kabar yang baik bagi AS, melalui strategi ini AS juga bisa mendapatkan peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas dengan Saudi.

## KESIMPULAN

Upaya pemulihan hubungan antara AS dan Saudi merupakan langkah yang sangat tepat diambil oleh Presiden Trump, dimana menurut analisis penulis ada dua hal yang sangat melatarbelakangi terjadinya upaya pemulihan hubungan antara kedua negara yakni, Saudi sebagai aktor utama dalam mengukuhkan hegemoni AS kembali di Timur Tengah dan manfaat peningkatan kerjasama dengan Saudi bagi AS.

Saudi jelas tidak bisa diragukan sebagai salah satu aktor yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di Timur Tengah, terbukti dalam andilnya dalam pertesisipasinya untuk menangani gejolak politik di kawasan itu. Kemudian, Saudi juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan militer di Timur Tengah. Jadi dapat dikatakan bahwa upaya pemulihan ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump pada masa pemerintahannya.

## Daftar Pustaka

- Anderson, Irvine H., *Aramco, the United States, and Saudi Arabia: A Study of the Dynamics of Foreign Oil Policy, 1933-1950*, Princeton Legacy Library, New Jersey, 2014.
- Blanchard, Christopher M., *Saudi Arabia : Background and U.S. Relation*, Congressional Research Service, Washington, D.C, 2009.
- Blanchard, Christopher M., "Saudi Arabia: Background and U.S. Relation", *Current Politics and Economics in Middle East*, New York, vol. 2, 2011 hal. 363-435.
- Clinton, W David, "The National Interest: Normative Foundation", *The Review Of Politics*, 1986, Vol. 48, No. 4, hal. 495-519.
- Gavin, Francis J., "American Monetary Policy and the Defense of Europe, 1960-1963.", *The Gold Battles Within the Cold War*, University of Texas, Austin, edisi 1960-1963, hal. 61-75.
- Gause, F. Gregory, *The International Relation of the Persian Gulf*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- Glanville, Luke, "Who Are We to Think About "National Interest" ?", *Australian Quarterly*, 2005 Vol. 77, No. 4, hal. 33-37.
- Grayson, Benson Lee, *Saudi-american Relation*, University Press America, Washington D.C., 1982.
- Hart, Parker T., *Saudi Arabia and the United States: Birth of Security Partnership*, Indiana University Press, Bloomington, 1998.
- Hyndmand, James E., "National Interest and The New Look", *International Journal*, 1970/1971, Vol. 26, No 1, hal. 5-18
- Holsti, K. J., *International Politics, A Framework of Analysis*, New Jersey, Prentice-Hall, 1992.
- Long, David E. dan Bernard Reich, *The Government and Politics of The Middle East and North Africa*, Colorado, West View Press Inc., 1980.
- Metz, Helen Chapin, *Saudi Arabia: A Country Study*, GPO for the Library of Congress, Washington D.C., 1992.
- Morgenthau, Hans J., *Politik Antarbangsa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ninic, Miroslav, "The National Interest and its Interpretation", *The Review of Politic*, 1999, Vol 61, No 1; hal. 29-55
- Oppenheim, Felix E., "National Interest : Rationally, and Morality", *Political Theory*, 1987, vol 15, No. 3; hal. 369-389
- Rochester, J Martin, "The National Interest and Contemporary World Politics", *The Review of Politics*, 1978 Vol 40, no 1; hal. 77-96
- Wittkopf, Eugene P., *American Foreign Policy : Pattern and Process*, Thomson Higher Education, Belmont, 2008.

## Website

- Aljazeera, "Iran 1979: The Islamic Revolution that Shook The World", <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/01/iran-1979-revolution-shook-world-2014121134227652609.html>, diakses pada 20 Maret 2018.
- Althunayyan, Hamad, 2017, "The US-Saudi Relations in the Trump era", [http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/05/saudi-relations-trump-era-170518\\_084540044.html](http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/05/saudi-relations-trump-era-170518_084540044.html) diakses pada 10 Juni 2017.
- Arab News, "King and Obama Deepen 21st Century Partnership", <http://www.arabnews.com/featured/news/802276>, diakses pada 6 Maret 2018.
- Arab News, "KSA, US Identifies New Areas of Cooperation Products" <http://www.arabnews.com/node/1041621/saudi-arabia> diakses pada 1 Maret 2018.
- Baer, Robert, "The Fall of House of Saud", <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/05/the-fall-of-the-house-of-saud/304215/>, diakses pada 7 Maret 2018.
- Business Pulse, "Kingdom, US plan Strategic Joint Consultative Group", <http://businesspulse.qa/en/eqstory/ZAWYA20170522043759/>, diakses pada 23 Maret 2018.
- Council on Foreign Relation, "U.S.-Saudi Relation", diakses dari <https://www.cfr.org/backgrounder/us-saudi-relations> pada 7 Juni 2017
- DW, "Saudi Arabia VS Iran : Dati "Twin Pillar" to Proxy Wars", <http://www.dw.com/en/saudi-arabia-vs-iran-Dati-twin-pillars-to-proxy-wars/a-41300083>, diakses pada 19 Maret 2018.
- Foreign Affairs, "Twin Pillars to Desert Storm: America's Flawed Vision in the Middle East Dati Nixon to Bush", <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1993-09-01/twin-pillars-desert-storm-americas-flawed-vision-middle-east-nixon>, diakses pada 19 Maret 2018.
- Moshinsky, Ben, "Saudi Arabia Spends 25% of Its Budget on Military – Here What It Has for The Money", <http://uk.businessinsider.com/saudi-arabia-spends-25-of-its-budget-on-its-military-2015-12/?IR=T>, diakses pada 20 April 2018.
- Pillar, Paul "Detente in The Persian Gulf is in Everyone's Interest", <http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/detente-the-persian-gulf-everyones-interests-21921> diakses pada 5 Oktober 2017.
- Prins, Gwyn, "Blood and Sand", <https://www.theguardian.com/world/2001/dec/21/afghanistan.britainand911> diakses pada 15 Oktober 2017
- Reuters, "Iran Troops to Join Syria War, Russia Bomb Group Trained by CIA", <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-syria/iran-troops-to-join-syria-war-russia-bombs-group-trained-by-cia-idUSKCN0RV41O20151002>, diakses pada 24 Maret 2018.
- U.S. Department of State, "Patterns of Global Terrorism 1994", [http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/arms/PGT\\_report/1994PGT.html](http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/arms/PGT_report/1994PGT.html) diakses pada 15 Oktober 2017.
- U.S. Department of State, "U.S. Saudi Arabia Fact Sheet", <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/06/143770.htm> diakses pada 7 Maret 2018.
- U.S. Department of State, "U.S. Relation with Saudi Arabia", <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3584.htm> diakses pada 5 Oktober 2017.
- U.S. Department of State, "U.S. Security Cooperation With Saudi Arabia", <https://www.state.gov/t/pm/rls/fs/2017/266861.htm> diakses pada 6 Oktober 2017.
- U.S. Military Strenght, "Middle East", <https://index.heritage.org/military/2017/assessments/operating-environment/middle-east/>, diakses pada 20 Maret 2018.

White House, "Joint Statement Between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States of America", <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-kingdom-saudi-arabia-united-states-america/>, diakses pada 29 Maret 2018.

Zakaria, Mohamad, "The United State of America Policy of Non-Interventionism in Syria", [https://www.researchgate.net/publication/301288569\\_The\\_United\\_States\\_of\\_America\\_politics\\_of\\_non-interventionism\\_in\\_Syria](https://www.researchgate.net/publication/301288569_The_United_States_of_America_politics_of_non-interventionism_in_Syria), diakses pada 24 Maret 2018.